

**ANALISIS KRITISIS FILSAFAT MUHAMMAD BĀQIR AL-ŞADR
TERHADAP SISTEM EKONOMI NEOLIBERAL****Firdausi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta

Email: *firda.firdausi@gmail.com***Kholid Al Walid**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Email: *kholid.alwalid@uinjkt.ac.id***ABSTRACT**

*The neoliberal economic system is an economic system that is used to support economic and political activities in almost all countries. However, a series of failures emerged from the neoliberal economic system. The basic problem with this system is the creation of high economic inequality at the country level and social inequality at the community level. This study aims to prove the fragility of the neoliberal economic system by using Muhammad Bāqir al-Şadr's sharp analysis of Materialism Capitalism. This study uses a literature study method using a qualitative descriptive critical analysis approach, which relies on library research and prioritizes philosophical and theoretical preparation, with the main reference sources being books by Muhammad Bāqir al-Şadr, especially *Falsafatunā* and *Iqtisādunā*. According to Bāqir al-Şadr, the Islamic economic system based on the doctrine of Islamic economics is the foundation for the formation of laws relating to the welfare and happiness of society in various aspects of life, including the economy. This economic system is also able to be the answer to the problems posed by various economic systems based on Capitalism and Materialism.*

Keywords: *Bāqir al-Şadr, Capitalism, Economy, Epistemology, Neoliberal.*

ABSTRAK

Sistem ekonomi neoliberal adalah sistem ekonomi yang digunakan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan politik di hampir semua negara. Namun rentetan kegagalan lahir dari sistem ekonomi neoliberal. Masalah mendasar pada sistem ini adalah terciptanya ketimpangan ekonomi yang tinggi pada tingkat negara dan kesenjangan sosial pada tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan membuktikan rapuhnya sistem ekonomi Neoliberal dengan menggunakan analisa tajam Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang Kapitalisme Materialisme. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan menggunakan pendekatan analisis kritis deskriptif kualitatif, yang bertumpu pada penelitian kepustakaan dan lebih mengutamakan olahan filosofis dan teoritis, dengan sumber referensi utama buku-buku karya Muhammad Bāqir al-Ṣadr terutama *Falsafatunā* dan *Iqtisādunā*. Menurut Bāqir al-Ṣadr sistem ekonomi Islam yang berasaskan doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Sistem ekonomi ini juga mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh berbagai sistem ekonomi yang berbasis Kapitalisme dan Materialisme.

Kata-kata Kunci: *Bāqir al-Ṣadr, Ekonomi, Epistemologi, Kapitalisme, Neoliberal.*

Pendahuluan

Problema dunia yang selalu menjadi perhatian utama manusia modern adalah pertanyaan tentang sistem apa yang paling sesuai untuk membangun kehidupan sosial umat manusia. Itulah pertanyaan paling pelik dan sangat sensitif yang selalu menghadang manusia sejak manusia memulai kehidupan sosialnya. Munculnya istilah Neoliberalisme menurut Milton Friedman sebagaimana dijelaskan oleh Domenico Losurdo (Losurdo 2011, 182), dimulai dari munculnya istilah Liberalisme pada awal abad ke - 17 ketika seorang filsuf dari Inggris yang bernama John Locke (1632-1704) mencetuskan ide-ide besarnya tentang Liberalisme. Paham Liberalisme ini kemudian menjadi filsafat yang sangat berpengaruh di Eropa. Besarnya pengaruh Liberalisme, bahkan Andrew Heywood mengatakan bahwa setiap pembahasan tentang ideologi politik harus dimulai dengan Liberalisme. Sementara, istilah Neoliberalisme baru muncul pada pasca Perang Dunia II. Munculnya istilah ini juga berkaitan dengan lahirnya semangat baru terhadap paham-paham Liberalisme yang sudah pernah ada (Heywood 2017, 56-60).

Menurut kaum Neoliberalis, tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang (Wisnu 2016). Hutang dari lembaga Neoliberalisme

seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), dan sebagainya justru jadi belenggu yang memaksa Indonesia menjual BUMN dan kekayaan alamnya. Kaum neoliberal seperti makelar hutang yang mendapat komisi dan berbagai keuntungan lainnya dari hasil hutang berupa bunga dan juga penjualan BUMN dan kekayaan alam negara jajahannya. Ditambah saat ini Rp 5.000 triliun/tahun (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 2019, 8) hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati rakyat sehingga mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat.

Maka, istilah Neoliberalisme itu sendiri jika diartikan secara harfiah terdiri dari kata neo dan Liberalisme yang berarti Liberalisme baru, atau Liberalisme gaya baru. Sehingga sebenarnya Neoliberalisme merupakan kontinuitas dari pemahaman Liberalisme yang sudah menyesuaikan dengan konteks zaman. Istilah ini kemudian semakin populer setelah dipraktekkan dengan sungguh-sungguh oleh Margaret Thatcher di Inggris pada tahun 1979 dan Ronald Reagan di Amerika pada tahun 1981 sampai 1989.

Sistem ekonomi yang terus diperbaharui menunjukkan betapa manusia tidak berhenti mencoba mencari solusi masalah sosial ekonomi, alih-alih menyempurna dan bertujuan menyelesaikan semua masalah ekonomi terkini, kenyataannya justru hanya menambah daftar catatan kelam suatu sistem ekonomi. Karena itu menjadi semakin jelas pentingnya untuk mengkaji topik ini. Penulis akan mengkaji lebih lanjut, aspek epistemologi dari sistem ekonomi neoliberal ini, sehingga diharapkan nantinya dapat didapatkan akar masalah dari kegagalan sistem ini.

Salah satu sistem alternatif yang dijadikan sandingan untuk menjawab sistem ekonomi produk Barat adalah sistem ekonomi Islam, yang lahir dari epistemologi filsafat Islam, dan salah satu yang diakui adalah Muhammad Bāqir al-Ṣadr, seorang pemikir terkemuka yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf antara 1950 dan 1980 yang berpengaruh dalam aspek politik dan ekonomi di kawasan Najaf dan Timur Tengah pada umumnya. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan bagaimana argumentasi filsafat Muhammad Bāqir al-Ṣadr dapat menunjukkan bukti rapuhnya sistem ekonomi neoliberal, prinsip-prinsip apakah yang hilang dalam sistem ekonomi neoliberal sehingga membawa dampak kehancuran ekonomi, dampak buruk apakah yang dihasilkan melalui penerapan sistem ekonomi neoliberal, serta apa solusi

yang ditawarkan Muhammad Bāqir al-Ṣadr terhadap sistem ekonomi dunia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis deskriptif kualitatif, yang bertumpu pada penelitian kepustakaan dan lebih mengutamakan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Dengan kata lain telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan, terutama terhadap pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr terkait Kapitalisme Materialisme. Kajian pemikiran ini juga tidak lepas dari dua objek, yaitu objek primer dan sekunder. Objek primer penelitian ini adalah pemikiran filosofis Muhammad Bāqir al-Ṣadr dalam mengkritisi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pemikiran-pemikiran Bāqir al-Ṣadr itu dapat ditemukan di buku "*Falsafatunā*" dan "*Iqtisādunā*". Sedangkan sumber sekundernya adalah segala bentuk pemikiran dan tulisan tentang sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi Islam yang berkembang secara global.

Basis Epistemologi

Menurut Bāqir al-Ṣadr, sistem sosial pada saat itu, yang juga berlanjut hingga kini, yaitu sistem demokrasi kapitalistik bukanlah suatu sistem sosial yang berangkat dari sebuah doktrin tentang kehidupan dan alam semesta juga tidak dibangun di atas pemahaman yang lengkap tentang nilai-nilai kehidupan yang terkait, yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Alasan itulah menurut Bāqir al-Ṣadr membuat sistem kapitalistik bukanlah sebuah keyakinan dalam arti sebenarnya, dan sebagai manusia yang bergerak maju dalam peradaban perlu menemukan keyakinan yang sebenarnya untuk dijadikan landasan terciptanya suatu sistem sosial yang baik dan berkeadilan (Ṣadr 2000, 33).

Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu: *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan (*knowledge*), dan *logos* berarti teori. Dengan demikian, epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi pada sisi lainnya biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan *logos* diartikan pikiran, kata teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazimnya disebut teori pengetahuan yang dalam Bahasa Inggris menjadi *Theory of Knowledge* (Munir dan Misnal, 2007, 16).

Harun Nasution menjelaskan bahwa pengertian episteme adalah pengetahuan dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang, apa itu pengetahuan?, dan bagaimana memperoleh pengetahuan? (Nasution 1973, 10).

Bāqir al-Şadr menguraikan beberapa teori yang kemudian ia kritisi berkenaan tentang teori pengetahuan. Yaitu tentang konsepsi manusia berkonsentrasi pada sumber-sumber dan sebab-sebabnya, serta afirmasi (*taşđiq*) dan pengetahuan. Dalam referensi lain disebutkan tentang definisi konsepsi (*taşawwur*) yaitu proses memahami makna sebuah perkara atau sesuatu hal tanpa disertai dengan penyandaran hukum dalam hal tersebut.

Adapun maksudnya yaitu gambaran makna dari sebuah perkara atau suatu hal yang berhasil terwujud dalam hati. Namun tidak dengan disertai suatu hukum baik dalam bentuk *pe-nisbat-an* (penyandaran) atau peniadaan (Azka dan Huda 2012, 43). *Taşawwur* atau konsepsi tersebut juga dapat diartikan dengan proses pembentukan pengertian (Sambas 2017, 40).

Bāqir al-Şadr mengkritisi sejumlah doktrin filsafat menyangkut masalah *taşđiq* (afirmasi). Doktrin yang dibahas yaitu doktrin rasional dan doktrin eksperimental (Şadr 2000, 47). Menurut Syukriadi Sambas (Sambas 2017, 40) *taşđiq* adalah mengerti hubungan yang sempurna antara dua objek tahu yang tunggal. Atau, menghukumi hakikat objek tahu dengan menetapkan sesuatu kepadanya atau meniadakan penetapan darinya.

Sedangkan menurut Aska (Azka dan Huda 2012, 23) *taşđiq* adalah memahami ada atau tidaknya hukum di dalam suatu perkara. Pemikiran epistemologi Baqir al-Şadr, maka dapat disimpulkan poin-poin pentingnya yaitu (Şadr 2000, 113):

- a. *Pertama*, pengetahuan manusia ada dua macam, yaitu konsepsi dan *taşđiq*. Konsepsi, termasuk berbagai bentuknya, tidak memiliki nilai objektif. *Taşđiq* atau pengetahuan tipe *taşđiq* adalah satu-satunya hal yang memiliki kualitas yang mengungkap realitas objektif secara esensial. Oleh karena itu, *taşđiq*-lah yang menyingkap keberadaan realitas objektif dari konsepsi.
- b. *Kedua*, semua pengetahuan tipe *taşđiq* bisa di-*nisbat*-kan pada pengetahuan primer yang niscaya dan keniscayaannya tidak bisa

dibuktikan serta kebenarannya tidak bisa didemonstrasikan. Namun, pikiran sadar terhadap keniscayaannya menerima pengetahuan ini dan meyakini kebenarannya. Contohnya prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas, dan prinsip-prinsip matematika primer.

- c. *Ketiga*, nilai pengetahuan bergantung pada tingkat sandaran pengetahuan pada prinsip-prinsip ini dan sejauh mana pengetahuan ini menarik kesimpulannya dari prinsip-prinsip tersebut. Bāqir al-Şadr menjawab poin ini dengan mendemonstrasikan prinsip yang menyatakan bahwa sesuatu tidak bisa terlepas dari sebabnya.
- d. *Keempat*, konsep mental yang terbentuk tentang realitas objektif tertentu mempunyai dua sisi. Satu sisinya adalah bentuk dari suatu objek dan keberadaan spesifiknya dalam pikiran kita. Namun, dalam hal lain, secara fundamental berbeda dari realitas objektif. Dengan demikian, kita mampu menentukan sisi objektif dari ide dan juga sisi subjektifnya, yaitu sisi ini ditarik dari realitas objektif dan sisi yang disifatkan pada formasi mental.

Jawaban Bāqir al-Şadr Tentang Doktrin Empiris

Para pendukung doktrin empiris ini menganggap bahwa pengalaman indrawi adalah sumber primer dan alat tertinggi pengetahuan. Akan tetapi, pengalaman indrawi tidak bisa berfungsi pada level filosofis karena subjek-subjek filsafat bersifat metafisika sehingga bukan subjek pengalaman sains jenis apa pun.

Menurut Bāqir al-Şadr, pernyataan positivistik bahwa proposisi itu hampa makna adalah keliru (Şadr 2000, 69), pasalnya bagaimanapun, makna adalah konsepsi yang direfleksikan oleh ekspresi dalam pikiran. Proposisi filosofis merefleksikan konsepsi semacam ini dalam pikiran para pendukungnya dan penentangannya juga. Selama ada konsepsi bahwa proposisi filosofis menyebabkan pikiran kita berkorespondensi dengan suatu objek di luar batas-batas pikiran dan ekspresi, proposisi ini benar. Jika tidak, maka proposisi itu salah. Sebab, kebenaran dan kesalahan dari tanda logis proposisi tidak diberikan oleh pengalaman indrawi sehingga kita bisa mengatakan bahwa suatu proposisi yang tidak tunduk pada pengalaman indrawi tidak bisa dideskripsikan dengan kebenaran atau kesalahan. Sebaliknya, keduanya adalah dua ekspresi dalam bentuk afirmasi atau negasi menyangkut korespondensi antara konsep suatu proposisi dalam pikiran dan suatu objek apa pun yang tetap di luar pikiran dan ekspresinya.

Bāqir al-Şadr mencontohkan hukum gravitasi, seseorang mampu melihat jatuhnya suatu benda ke tanah, namun tidak bisa melihat hukum gravitasinya, karena hukum tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Jika Positivisme puas dengan apa yang tampak secara tidak langsung, maka proposisi filosofis memiliki hal-hal dihindari secara tidak langsung, tepat sebagaimana sejumlah proposisi sains, yakni ada hal-hal dihindari dan kondisi aktual yang terkait dengan proposisi filosofis. Jika hal-hal dan kondisi semacam ini tersedia, proposisi itu benar; kalau tidak, maka proposisi itu salah. Dengan demikian, demonstrasi Bāqir al-Şadr tersebut menjawab dengan baik tuduhan positivistik yang mengatakan bahwa proposisi filosofis tidak bermakna karena tidak memberikan informasi apapun tentang dunia ini (Şadr 2000, 67).

Bāqir al-Şadr dalam karyanya "*Falsafatunā*" dengan terang melakukan kritik terhadap doktrin empiris dengan menyatakan apakah menjadikan pengalaman empiris sebagai kriteria utama dan satu-satunya syarat dalam menerima pengetahuan adalah kriteria niscaya yang di-*taşdiq* (afirmasi) berdasarkan pengalaman sebelumnya? Ataukah ia sama dengan pengetahuan lainnya yang bukan pengetahuan bawaan dan bukan pula pengetahuan niscaya? Jika doktrin empiris menyatakan bahwa pengalaman adalah kriteria niscaya maka seharusnya menurut Bāqir al-Şadr, doktrin empiris pun harus menerima kriteria pengetahuan niscaya dalam doktrin rasional, sebagaimana doktrin empiris menjadikan pengalaman sebagai kriteria pengetahuan niscaya. Kalau doktrin empiris tidak menerima kriteria pengetahuan niscaya (doktrin rasional), maka bagaimana doktrin empiris meniscayakan pengalaman sebelum adanya pengalaman (pengalaman terjadi). Jadi, meniscayakan pengalaman ilmiah sebelum dilakukan penelitian ilmiah.

Dengan demikian, prinsip pengalaman sebagai kriteria niscaya pengetahuan dalam doktrin empiris menjadi gugur karena tidak mungkin ditetapkan pengalaman ilmiah sebagai sebuah kriteria keniscayaan pengetahuan sebelum adanya pengalaman. Sehingga menurut Bāqir al-Şadr, sebagaimana dituliskan oleh Hamzah (Hamzah 2017, 28) penafsiran konsepsi manusia secara empirik murni harus ditolak dengan menggunakan teori disposisi.

Sedangkan posisi rasional dan empirik yang biasa dipakai di Barat sebagai epistemologi yang berwatak dikotomis, oleh Bāqir al-Şadr keduanya dinilai sebagai perangkat yang digunakan untuk mengolah

sekaligus melakukan afirmasi terhadap konsepsi primer. Penggunaan rasio murni di satu pihak dan empirik murni di lain pihak sebagai epistemologi dalam melakukan afirmasi (*taṣḍiq*) akan berkonsekuensi pada nihilisme sehingga, menurut Bāqir al-Ṣadr, *taṣḍiq* bermula dari proposisi universal yang diyakini benar berdasarkan realitas objektif yang partikular.

Ekonomi Islam Sebagai Doktrin

Bāqir al-Ṣadr memberikan solusi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan konsep sistem ekonomi yang lebih baik ketimbang sistem ekonomi yang sudah ada pada saat itu yaitu Kapitalisme-Liberalisme dan Sosialisme-Komunisme. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Bāqir al-Ṣadr, perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa menurut Bāqir al-Ṣadr ada dua aspek dalam perekonomian, yaitu ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan, yang memberikan penjelasan tentang kehidupan ekonomi, peristiwa ekonomi, dan fenomena ekonomi serta menghubungkan peristiwa dan fenomena dengan penyebab umum dan faktor penting di dalamnya. Doktrin ekonomi adalah cara masyarakat mengekspresikan kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah praktisnya. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Bāqir al-Ṣadr pada teori ekonominya adalah doktrin ekonomi bukan ilmu ekonominya yang berhubungan dengan ranah praktis manusia (Ṣadr 1994, xi).

Menurut Bāqir al-Ṣadr tidak mungkin masyarakat tidak memiliki doktrin ekonomi yang melekat dalam kehidupannya, karena pada kenyataannya masyarakat memiliki suatu metode dalam menjalankan kegiatan ekonominya, seperti memproduksi barang maupun dalam mendistribusikannya.

Doktrin ekonomi terdiri dari setiap aturan dasar kehidupan ekonomi yang terkait dengan ideologi (keadilan sosial). Ilmu (ekonomi), terdiri dari setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi terlepas dari ideologi yang diawali atau dicita-citakan yaitu keadilan. Keadilan bukanlah ide ilmiah, jadi ketika ia digabungkan dengan sebuah ide, ia mencetaknya dengan cap doktrinal dan membuatnya berbeda dari pemikiran ilmiah. Contohnya prinsip kebebasan ekonomi milik pribadi, penghapusan kepentingan atau nasionalisasi alat-alat produksi, semua itu masuk dalam doktrin karena berkaitan dengan gagasan keadilan. Adapun hukum pengembalian yang semakin berkurang dan hukum

permintaan dan penawaran atau hukum tentang upah, semua ini adalah hukum ilmiah, karena tidak ada hubungannya dengan evaluasi fenomena ekonomi tersebut.

Menurut Bāqir al-Ṣadr (Ṣadr 1994, 9), semua hukum-hukum ilmiah tersebut hanya bersandar pada deduksi dari realitas dan pengamatan berbagai macam manifestasinya yang tak terhitung banyaknya. Hal ini bertolak belakang dengan kasus hukum doktrinal, yang selalu terkandung dalam ideologi keadilan yang pasti.

Setelah menjelaskan ekonomi Islam sebagai doktrin, Bāqir al-Ṣadr kemudian memberikan solusi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan konsep sistem ekonomi yang lebih baik. Sebagai solusi atas hal ini, Bāqir al-Ṣadr kemudian menyampaikan beberapa teori dan konsep mengenai ekonomi Islam yang ideal, di antaranya adalah mengenai Teori Distribusi (*Distribution Theory*). Teori ini terbagi menjadi dua, pra-produksi dan pasca-produksi, yang masing-masing memiliki prinsip dalam prosesnya. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran Bāqir al-Ṣadr yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam berangkat dari proses distribusi sebagai langkah awal, bukan produksi (Aravik 2017, 20).

Oleh karena itu, proses distribusi harus menjadi tonggak awal yang perlu diperhatikan dalam proses ekonomi.

Selain itu, Bāqir al-Ṣadr juga menegaskan posisi penting negara sebagai pemegang tanggung jawab atas berjalannya proses dan kegiatan ekonomi masyarakat. Teori ini dikenal dengan Teori Tanggung Jawab Negara yang memiliki tiga konsep dasar sebagai landasannya (Aziz 2013), yaitu:

- a. Jaminan sosial, yaitu memastikan negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat.
- b. Keseimbangan sosial, yaitu tidak berarti keseimbangan dalam hal pendapatan atau kekayaan, karena bagaimanapun hal tersebut mustahil terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antar individu yang terkait dengan karakter dan kecakapan, sehingga hasil kerja dan upahnya pun pasti akan berbeda.
- c. Hak intervensi negara, berlaku untuk memastikan bahwa proses ekonomi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat berjalan dengan teratur dan tidak menyalahi aturan.

Neoliberalisme Sebagai Lanjutan dari Liberalisme Kapitalis

Neoliberalisme menurut Harvey (Harvey 2005, 1) adalah teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat dimajukan dengan baik dengan cara membebaskan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individu dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas, atau yang sering disebut globalisasi. Peran negara adalah untuk menciptakan dan menjamin berjalannya kerangka kelembagaan yang sesuai dengan praktik itu.

Namun dengan terjadinya krisis minyak bumi yang dimulai pada akhir tahun 1973, mengakibatkan resesi ekonomi dunia, menyeret negara-negara dunia ketiga tidak mampu membayar hutangnya. Krisis minyak bumi mendorong negara-negara kapitalis menempuh cara baru di dalam mengelola perekonomiannya, inilah yang mengilhami munculnya kembali paham sistem ekonomi kapitalis dengan nama baru yaitu Neoliberalisme. Menurut Agustiati, sistem ekonomi neoliberal dikembangkan ke dalam kerangka liberalisme yang lebih sistematis (Agustiati 2009, 162-163).

Setelah 1975, sumbangan penting bagi penyebaran Neoliberalisme versi Amerika dibuat di Chili oleh "*Chicago Boys*" yaitu sekelompok besar orang Chili yang sebagian besar pernah belajar di Universitas di Chicago pada tahun 1956–1970. Chili menjadi lapangan eksperimental yang sangat cocok untuk menguji konsep neoliberal versi Mazhab Chicago (Elzbieta dan Piotr 2010, 21).

Kemudian, pada tahun 1980, Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dan mengarahkan AS untuk merevitalisasi ekonominya dengan mendukung langkah Volcker di The Fed dan menambahkan perpaduan kebijakan khusus untuk mengekang kekuatan tenaga kerja, deregulasi industri, pertanian, dan ekstraksi sumber daya, dan membebaskan kekuatan keuangan baik secara internal maupun di panggung dunia. Dari beberapa episentrum ini, impuls revolusioner seolah menyebarkan dan bergema untuk membuat citra berbeda di dunia. Menurut Harvey, Volcker dan Thatcher kemudian sama-sama mengambil dari sebuah doktrin yang disebut Neoliberalisme dan kemudian mengubahnya menjadi prinsip sentral atas segala pemikiran dan manajemen ekonomi (Harvey 2005, 2).

Sebagaimana dijelaskan juga oleh Deliarnov (Deliarnov 1997, 179) berbicara tentang Neoliberalisme tentu harus menyinggung liberalisme

terlebih dahulu, karena Neoliberalisme sesungguhnya merupakan eksistensi dari paham Kapitalisme Liberal, yaitu paham liberalisme yang sudah mengarah pada sektor ekonomi, paham ekonomi politik free market. Paham yang membatasi peran pemerintah dalam mengelola pasar, dan pengekanan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Paham ini pada intinya memperjuangkan persaingan bebas (*laissez faire*), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual. Menurut Mark Reiff (Reiff 2016, 2) kebangkitan liberalisme ekonomi sebagian besar bertepatan dengan kebangkitan ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu.

Gérard Duménil dan Dominique Lévy dalam bukunya "*The Crisis of Neoliberalism*" sebagaimana diuraikan oleh Dallas dan Farangis (Dallas dan Farangis 2016, 7), mereka mengklaim bahwa Neoliberalisme telah melampaui Liberalisme. Para penulis ini menyatakan, "*Neoliberalisme adalah tahap baru Kapitalisme*".

Pada perkembangannya, sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi liberal yang terbagi menjadi beberapa jenis menurut ketebalan konsepsi mereka tentang kebebasan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan tiga divisi utama liberalisme, yaitu: Libertarian, Liberalisme Klasik, Liberalisme Tinggi, hingga pada akhirnya sampai kepada Neoliberalisme. Konsep-konsep kebebasan ekonomi yang berbeda ini menghasilkan pandangan yang berbeda tentang keadilan distributif (Platz dan Tomasi 2015, 265-267).

Howard dan John (Howard dan King 2008, 43-45) menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu sistem kapitalis terus berkembang dengan atribut-atribut barunya, perubahan tersebut didasari pada perkembangan produktif namun tanpa melepaskan variasi spasial dalam sistem kapitalis, yang juga dapat dijelaskan dalam istilah materialis. Dalam konteks akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu, Neoliberalisme adalah kecenderungan kuat yang beroperasi di semua sistem kapitalis yang lebih berkembang. Oposisi antara negara dan pasar adalah bagian dari agenda neoliberal yang hanya menjadi masalah di zaman kita ketika pada 1980-an dan 1990-an, Neoliberalisme tumbuh begitu hegemonik sehingga programnya tampak alami dan sah. Hal ini senada dengan apa yang dituliskan oleh Luiz Calos (Pereira 2009, 9) bahwa Neoliberalisme adalah ideologi hegemonik dari awal 1980-an hingga awal 2000-an. Itu adalah ideologi yang diadopsi dan dipromosikan

oleh pemerintah Amerika sejak Ronald Reagan.

Neoliberalisme menekankan pada kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal ini berarti manusia sebagai makhluk ekonomi melakukan kegiatan ekonominya secara sadar, sengaja dan bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan logis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka.

Epistemologi Neoliberalisme

Epistemologi menjadi kecenderungan cara berpikir masyarakat sangat berpengaruh pada sistem ekonomi yang terbentuk, oleh karena itu untuk mencari jawaban dari penelitian ini perlu ditelaah terlebih dahulu epistemologi sistem ekonomi neoliberal ini. Akar lahirnya sistem ekonomi Kapitalisme adalah Kapitalisme Adam Smith yang dipelajari oleh filsafat yang berkembang pada masa itu, seperti Liberalisme, Individualisme, Rasionalisme serta mempunyai kaitan dengan hukum alam (Soetrisno 1992, 27).

Diungkapkan oleh Cahyadi (Takariawan dkk. 2003, 25) bahwa kecenderungan filsafat Eropa dan Barat pada umumnya mengarah kepada aliran positivisme, hal ini bukan semata-mata atau kebetulan, hal ini dikarenakan filsafat mereka memang dibangun diatas epistemologi yang lebih bersifat positivis. Mereka memadankan positivisme dengan sifat empiris, objektif dan realitas. Pemikiran-pemikiran yang lahir akhirnya mendasarkan dan membatasi pengetahuan manusia pada data yang didapatkan oleh pancaindra belaka.

Pengaruh positivisme dalam ilmu ekonomi meliputi rentang waktu sekitar 40 tahun (1930-1970). Tiga ekonom yang tulisannya sebagian besar mencerminkan pengaruh dari positivisme adalah T.W. Hutchison, Paul Samuelson, dan Milton Friedman. Bryant juga menjelaskan positivisme memiliki akar epistemologis dari empirisisme, disamping tentu saja rasionalisme (Bryant 1845, 6). Positivisme yang diusung oleh Locke sebagaimana diuraikan oleh Bradley (Brewer 2014, 29-30) kemudian melahirkan konsep kebebasan sempurna yang menurut Locke dapat disamakan dengan kesetaraan. Kesetaraan bagi Locke seharusnya tidak dipahami sebagai keadaan di mana semua orang setara dalam segala hal. Bagi Locke setiap individu adalah otonom atas tindakan mereka sendiri, dan tidak terikat pada raja tertentu.

Hegemoni Sistem Ekonomi Neoliberal

Oposisi antara negara dan pasar adalah bagian dari agenda neoliberal yang hanya menjadi masalah di zaman kita ketika, pada 1980-an dan 1990-an, Neoliberalisme tumbuh begitu hegemonik sehingga programnya tampak alami dan sah. Melalui konsep hegemoni, Heryanto (Heryanto 1997, 85) memaparkan argumentasi Gramsci, bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcement. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga.

Neoliberalisme dalam makna private property rights, free markets, and free trade merupakan rangkaian khusus yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hidup manusia serta dalam berbagai aktivitasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, baik dahulu maupun saat ini (yang manusia terjerat dengan dunia industrialisasi) besar kemungkinan tidak akan terlepas dari ruh Neoliberalisme ini. Seolah ini sudah menjadi syarat fundamental dalam keberlangsungan hidup manusia abad dewasa ini (Dallas dan Farangis 2016, 10).

Lebih dalam lagi, Neoliberalisme ini secara nyata telah membawa dominasi-dominasi khusus atas sebuah negara terhadap negara dan bangsa lain. Amerika Serikat misalnya, dengan jargon *super power* atau “negara adidaya” di mana perilakunya telah lama mendominasi berbagai negara-negara berkembang dunia dengan label neoliberal bercirikan *free market* dan *free trade area*, dengan berbagai *agreement* (kesepakatan) maupun *policy* (kebijakan) yang dibuatnya baik secara bilateral, regional, atau multilateral berikut syarat yang harus diikuti. Harvey mengatakan bahwa, peran negara dalam hal ini adalah untuk membuat atau menciptakan dan kemudian memelihara secara kelembagaan atau institusional yang tepat untuk melakukan praktek-praktek tersebut. ditambah lagi Melalui sponsor oleh Inggris dan Amerika, gagasan Neoliberalisme di tingkat global juga menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Hal senada diungkapkan oleh Kean and Simon (Birch dan Springer 2019, 468) bahwa pendukung neoliberal menempati posisi yang cukup berpengaruh dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari pendidikan, media, ruang rapat perusahaan dan lembaga keuangan, di lembaga negara utama (Departemen Keuangan, Bank Sentral), dan juga di lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur keuangan dan perdagangan global. Neoliberalisme, singkatnya, menjadi hegemoni sebagai modus wacana memiliki efek yang menyebar pada cara berpikir sampai pada titik di mana ia telah dimasukkan ke dalam cara yang masuk akal dan seolah begitu alami sehingga banyak dari kita menafsirkan dan memahami dunia melalui kacamata Neoliberalisme.

Terkait hal tersebut di atas, Harvey memberikan contoh mengenai *Washington Consensus* (Harvey 2005, 64-66) yang isinya di antaranya mengenai disiplin fiskal, reformasi perpajakan, mengurangi subsidi untuk masyarakat, liberalisasi keuangan, perubahan nilai tukar mata uang yang mengikuti nilai mata uang negara yang kuat bertujuan agar pasar lebih kompetitif, deregulasi sektor ekonomi, liberalisasi perdagangan, penanaman modal asing (PMA), privatisasi perusahaan-perusahaan negara, termasuk penghormatan atau penghargaan pada hak milik. Oleh karenanya, tujuan dari kesemua yang termaktub dalam konsensus di atas tersebut adalah agar bagaimana caranya untuk meminimalisir peran negara, akan tetapi disisi lain juga menguatkan dukungan negara pada pasar. Hal tersebut karena pasar pada prakteknya dalam pandangan kelompok ini adalah kunci agar bagaimana keberlangsungan semangat Neoliberalisme ini tetap bertahan dan berjalan serta membawa negara-negara yang sedang berkembang pada posisi tertekan secara politis.

Harvey juga menyebutkan bahwa dengan ini masyarakat hanya sekedar menjadi target pasar dan menjadi alat bagi pasar itu sendiri, sedang negara sebagai pihak yang memfasilitasi masuknya segala produk-produk *multinational corporation* (MNC) maupun aspek yang bernuansa bisnis, hal ini disebut sebagai *Neoliberalism State*, yaitu negara dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya memainkan peranan penting dan sebagai pihak yang memfasilitasi, mendorong juga melindungi agar bagaimana nilai-nilai Neoliberalisme, proyek-proyek Neoliberalisme, dan kepentingan Neoliberalisme dapat menyebar dan terus berjalan. Lebih lanjut Harvey mengatakan bahwa *Neoliberalism State* bertujuan untuk memunculkan dan menciptakan suasana bisnis yang mendukung

“*good bussiness climate*” untuk akumulasi modal termasuk di dalamnya komoditas, entah apapun dampak yang kemudian akan ditimbulkannya karenanya (Harvey 2005, 70).

Atribut Baru Sistem Ekonomi Neoliberal

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (*Washington Consensus*). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga dapat dikatakan Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintah sampai titik minimum. Atribut pertama yang dapat disimpulkan dari paragraf di atas yaitu atribut baru pada sistem ekonomi neoliberal adalah adanya penekanan intervensi pemerintah dan membebaskan ekonomi pasar.

Liberalisme klasik dan Neoliberalisme sama-sama memiliki prinsip fundamentalisme pasar, atau asumsi bahwa pasar bebas secara spontan akan membentuk tatanan ekonomi secara efisien sehingga peran negara akan direduksi. Adapun yang membuat kedua teori ekonomi ini berbeda adalah perlakuannya terhadap masalah etika dan moral.

Menurut ekonom Harvard, D. Rodrik yang dikutip oleh Elzbieta, perbedaan antara Neoliberalisme dan liberalisme klasik mirip dengan hubungan antara astrologi dan astronomi: baik Liberalisme klasik maupun Neoliberalisme bukanlah sains, melainkan ideologi yang mengesampingkan konteks moralitas, tanggung jawab, dan etika (Elzbieta dan Piotr 2010, 27).

Hasil penelitian Yunus (Bakar, 2012) menyebutkan bahwa Neoliberalisme adalah lanjutan ideologi Liberalisme yang diusung Adam Smith tiga abad lalu. Namun, ada tiga perbedaan antara Neoliberalisme dan Liberalisme, yaitu:

- a. *Pertama*, dalam Liberalisme mekanisme pasar dipakai untuk mengatur ekonomi negara, sedangkan dalam Neoliberalisme ia harus digunakan untuk mengatur ekonomi global. Dengan bantuan globalisasi, Neoliberalisme bisa menjadi *universal value*.
- b. *Kedua*, dalam Neoliberalisme kinerja pasar dipakai untuk memakmurkan individu (*individual wealth*), sedangkan dalam

Liberalisme dipakai untuk kemakmuran bersama (*commonwealth*). Kesejahteraan dan kemakmuran individu lebih diutamakan dalam paham Neoliberalisme.

- c. *Ketiga*, Liberalis memenganggap otoritas regulatif negara diperlukan, sedangkan Neoliberalisme justru menekankan pelimpahan otoritas regulatif dari negara ke individu, atau dari *social welfare* ke *selfcare*.

Kritik Terhadap Struktur Sistem Ekonomi Kapitalis

Bāqir al-Şadr memulai analisisnya dengan membagi struktur ilmu ekonomi menjadi dua aspek, yaitu ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Hal ini dilakukan oleh Bāqir al-Şadr untuk memperjelas posisi pemikiran kritis yang dilontarkannya. Menurut Bāqir al-Şadr, sebagaimana juga telah diuraikan lebih lengkap pada bab sebelumnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang kehidupan ekonomi, peristiwa ekonomi dan fenomena ekonomi dan keterkaitan peristiwa dan fenomena tersebut dengan sebab dan faktor umum yang mengaturnya sedangkan doktrin ekonomi adalah ungkapan cara yang lebih disukai masyarakat dalam kehidupan ekonominya dan dalam pemecahan masalah-masalah praktisnya (Şadr 1994, 6).

Menurut Bāqir al-Şadr Doktrin ekonomi terdiri dari setiap aturan dasar kehidupan ekonomi yang terkait dengan ideologi keadilan sosial. Ilmu (ekonomi) terdiri dari setiap teori, yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi terlepas dari ideologi yang diawali atau cita-cita Keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Bāqir al-Şadr, garis pemisah antara sains dan doktrin adalah ideologi keadilan sosial (Şadr 1994, 10).

Şadr menyebutkan bahwa kapitalis bukanlah hasil dari ilmu ekonomi yang dibentuk oleh kaum kapitalis, keberhasilan doktrin tersebut sejauh ini juga tidak terkait dengan tingkat keberhasilan dalam aspek ilmiahnya dalam menjelaskan realitas objektif. Melainkan, doktrin tersebut bergantung pada beberapa nilai moral dan beberapa nilai praktis yang harus dianggap sebagai kriteria untuk memberikan putusan yang mendukung atau menentangnya, dengan kata lain standar penilaian dibuat oleh pendirinya (Feirson 2013, 1-6).

Bāqir al-Şadr membagi ekonomi kapitalis menjadi aspek ilmiah dan aspek doktrinal. Pada kemunculan ekonomi kapitalis, ada dua gagasan yang menyebar di antara para ekonom. Pertama, yaitu kehidupan ekonomi berjalan sesuai dengan beberapa hukum alam, yang mendominasi semua entitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tugas para ekonom adalah menemukan hukum-hukum tersebut, untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa ekonomi yang berbeda yang timbul dalam kehidupan manusia. Menurut Bāqir al-Şadr, gagasan ini meletakkan dasar ilmiah ekonomi kapitalis. Kedua, yaitu hukum alam ini menjamin kebahagiaan manusia, asalkan mereka ditegakkan dalam lingkungan yang bebas dan semua anggota masyarakat menikmati kebebasan kepemilikan, eksploitasi dan konsumsi. Gagasan kedua ini menurut Bāqir al-Şadr meletakkan fondasi doktrinal (Şadr 1994, 9).

Bāqir al-Şadr merespon dengan kritis bahwa pemikiran tersebut keliru, karena pada diri setiap manusia terdapat kodrat yang bekerja sesuai hukumnya disebut hukum kodrat (*the natural law*), hukum kodrat ini menurut Bāqir al-Şadr tidak pernah gagal dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, suatu kekeliruan jika menganggap kebebasan kapitalis sebagai ekspresi hukum alam dan menganggap pelanggaran atas kodrat manusia sebagai kejahatan terhadap manusia itu sendiri (Şadr 1994, 10).

Oleh karena itu Bāqir al-Şadr berpendapat bahwa Kapitalisme bukanlah hasil dari ilmu ekonomi yang dibentuk oleh kaum kapitalis, keberhasilan doktrin tersebut sejauh ini juga tidak terkait dengan tingkat keberhasilan dalam aspek ilmiahnya dalam menjelaskan realitas objektif. Melainkan, doktrin tersebut bergantung pada beberapa nilai moral dan beberapa nilai praktis yang harus dianggap sebagai kriteria untuk memberikan putusan yang mendukung atau menentangnya, dengan kata lain standar penilaian dibuat oleh pendirinya (Şadr 1994).

Lebih jauh, Bāqir al-Şadr juga menekankan bahwa meskipun doktrin kapitalis tidak memperoleh pembenaran terkait keberadaannya dari hukum ilmiah di bidang ekonomi, akan tetapi, hukum ilmiah dalam ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh doktrin kapitalis.

Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Neoliberal

Ideologi materialism melahirkan sistem ekonomi Liberalisme Kapitalisme. Sistem ekonomi ini kemudian tumbuh secara hegemoni sehingga tidak saja hanya mempengaruhi sistem ekonomi tetapi begitu mengakar ke hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga

menjelma menjadi budaya Kapitalisme. Sebagaimana diuraikan oleh Jake Feirson, bahwa sistem Neoliberalisme juga memberikan wawasan tentang perilaku yang ditunjukkan oleh perusahaan multinasional dan besar, mengacu pada ideologi kapitalis untuk pengembangan konsekuensial dari sistem produksi, yang menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, dengan murah dan efisien. Lebih jauh, termasuk bagaimana Kapitalisme merangsang pemisahan kelas-kelas sosial-ekonomi yang berbeda, sementara juga menumbuhkan kebutuhan akan tingkat kelas-kelas sosial ekonomi yang miskin. Semuanya, disebarkan melalui hubungan antara kapitalis dan pemerintah formal, dan dengan perlindungan perusahaan raksasa melalui kebijakan dan peraturan pemerintah. Disebutkan juga oleh Mc Grew (Held et al. 1999) bahwa Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas, berhasil menekan intervensi pemerintah dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi pada kekuatan, selain itu terdapat beberapa atribut baru lainnya dalam sistem ekonomi neoliberal, berikut adalah penjelasannya:

1. *Free Enterprise*

Poin ini dapat dikritisi dengan menggunakan analisa Bāqir al-Ṣadr dalam mengkritisi sistem ekonomi kapitalis, ia menegaskan bahwa inti dari segala permasalahan ekonomi yang terjadi di dunia justru dikarenakan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang membolehkan dan memberikan akses kepada orang-orang kalangan atas untuk dapat mengeksploitasi kekayaan dari kalangan masyarakat bawah. Dalam sistem ekonomi neoliberal, lembaga-lembaga dunia seperti WTO, IMF dan Trans Multinational Corporation (TNC) menjadi pihak yang melakukan kesewenang-wenangan kepada negara-negara sedang berkembang, dengan mengharuskan mereka meminjam dana kepada lembaga tersebut dan dikembalikan dengan tingkat bunga yang tinggi, dan negara yang tidak bersedia menandatangani keikutsertaan akan mendapatkan hukuman yang berat (Harvey 2007, 23; Sutopo 2012, 33). Kebijakan ini semakin membuat negara-negara yang sedang berkembang terjatuh hutang yang tak kunjung usai dan semakin jauh untuk mengejar ketertinggalannya. Lebih lanjut hal ini menyebabkan besarnya kesenjangan antar kelas ekonomi di masyarakat, sekaligus membuat keserakahan manusia semakin tak terkendali (Hiarief 2004).

Bāqir al-Ṣadr menyampaikan beberapa teori dan konsep mengenai ekonomi Islam yang ideal, di antaranya adalah mengenai Teori Distribusi

(*Distribution Theory*). Teori ini terbagi menjadi dua, pra-produksi dan pasca-produksi, yang masing-masing memiliki prinsip dalam prosesnya.

2. Manusia sebagai *Homo Economicus*

Bagi Neoliberal, manusia adalah makhluk ekonomi atau yang biasa disebut dengan istilah *homo economicus* (Dallas dan Farangis 2016, 8). Dalam konsep *homo economicus*, manusia memiliki sifat dasar mencari kekayaan pribadi secara terus-menerus. Kekayaan pribadi inilah yang menjadi tolok ukur dari kesejahteraan manusia. Ketidadaan hak kekayaan pribadi membuat manusia tidak dapat memperoleh kesejahteraan (Harvey 2005, 64).

Sesuai dengan apa yang dikritisi oleh Bāqir al-Şadr yang menganggap bahwa inti dari permasalahan ekonomi terletak pada sifat keserakahan dan kerakusan individu yang tak terbatas. Manusia diciptakan sebagai khalifah Tuhan di bumi, yang berarti bahwa ia adalah wakil dari Yang Mahakuasa. Dalam arti ekonomi, pernyataan ini mengisyaratkan bahwa manusia adalah wakil Tuhan yang ditugaskan untuk mengurus dan mengatur kekayaan alam yang ada di bumi lewat sistem ekonomi (Şadr 1994, 24).

3. Privatisasi Aset Publik Pengurangan Program Kesejahteraan dan Subsidi

Korporatisasi, komodifikasi, dan privatisasi aset publik sampai sekarang telah menjadi fitur sinyal dari proyek Neoliberal. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan baru untuk akumulasi modal di domain yang sebelumnya dianggap terlarang bagi kalkulus profitabilitas. Segala jenis fasilitas publik (air, telekomunikasi, transportasi), penyediaan kesejahteraan sosial (perumahan umum, pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun), lembaga publik (seperti universitas, laboratorium penelitian, penjara), semuanya telah diprivatisasi sampai taraf tertentu di seluruh dunia kapitalis (Harvey 2007, 35-56).

Sejalan dengan poin ketiga ini, Bāqir al-Şadr telah mengkritisi dengan menyatakan bahwa setiap individu ataupun segelintir orang tidak dibebaskan untuk memiliki seluruh sumber daya alam seperti dalam ekonomi kapitalis, namun juga tidak mengemukakan gagasan tentang kepemilikan semua aset dan sumber daya alam di tangan negara (Aziz 2013).

Bāqir al-Şadr juga menyatakan bahwa masalah utama ekonomi

adalah kezaliman dan kekufuran manusia. Kezaliman dalam konteks ekonomi menurut Bāqir al-Ṣadr adalah kezaliman dalam hal distribusi kekayaan yaitu rusaknya distribusi kekayaan dan keingkaran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Kedua hal tersebut adalah dua faktor yang menciptakan kesengsaraan manusia (Qomar 2016, 10).

Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat dalam doktrin Neoliberalisme merupakan suatu kezaliman karena demi menjamin terbayarnya cicilan hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang kepada IMF sebagai lembaga keuangan internasional. Masyarakat menengah kebawah menjadi korban dengan dipangkasnya subsidi. Padahal, hutang-hutang tersebut lebih banyak bersifat dipaksakan, dan semakin kejam dengan adanya kedok globalisasi yang akhirnya membuat perusahaan-perusahaan multinasional masuk dan menguasai pasar, akibatnya pasar dikendalikan bahkan dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tersebut dimana pemiliknya tidak lain adalah negara-negara maju juga.

Kesimpulan

Neoliberalisme adalah tahap baru Kapitalisme, sehingga berbagai permasalahan yang timbul dari penerapan sistem ekonomi ini sebetulnya sama saja dengan sistem-sistem ekonomi sebelumnya yang juga berbasis pada Kapitalisme dan basis epistemologi Kapitalisme adalah pemikiran positivistik. Menurut aliran positivistik pengalaman indrawi adalah sumber primer dan alat tertinggi pengetahuan. Sedangkan pada level filosofis, karena subjek-subjek filsafat berada diluar ruang lingkup eksperimen empiris sehingga tidak termasuk dalam subjek pengalaman sains jenis apapun dan hampa makna. Menurut Bāqir al-Ṣadr hal tersebut keliru, karena bagaimanapun makna adalah konsepsi yang direfleksikan oleh ekspresi dalam pikiran. Selama suatu pengetahuan menyebabkan pikiran dan ekspresi kita berkorespondensi dengan suatu objek di luar batas-batas pikiran dan ekspresi, bahkan mempengaruhi pada apa yang kita lakukan, maka pengetahuan itu benar. Seperti hukum gravitasi, seseorang mampu melihat jatuhnya suatu benda ke tanah, namun tidak bisa melihat hukum gravitasinya, karena hukum tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dihindari.

Berdasarkan analisis menggunakan filsafat Bāqir al-Ṣadr, dapat disimpulkan bahwa gagalnya sistem ekonomi neoliberal, adalah karena basis epistemologi Barat yang menolak kebenaran yang tidak terinderai, sehingga aspek spiritual dikesampingkan dalam kehidupan manusia.

Homo Economicus menjadi tidak menyadari adanya pertanggungjawaban ilahiah atas segala yang dilakukannya di dunia ini, dan karena tidak meyakini Tuhan yang realitasnya bersifat gaib, maka mereka tidak pernah merasa diawasi oleh Tuhan.

Dampak buruknya adalah manusia seolah diberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai hal terutama dalam mengikuti nafsu dan keserakahannya dan tidak lagi peduli dengan cara yang digunakan sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Bahkan akses ini diberikan bukan hanya pada tingkat masyarakat regional melainkan pada tingkat antar negara, contohnya dengan kebijakan globalisasi. Akhirnya menciptakan berbagai bentuk kezaliman, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang begitu besar. Meskipun dalam konteks lain globalisasi tidak sepenuhnya membawa dampak buruk, hanya saja hal ini dijadikan alat oleh pihak negara-negara *super power* untuk menguasai dan menjajah negara-negara lainnya yang belum maju.

Menurut Bāqir al-Ṣadr, sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Bāqir al-Ṣadr berpandangan bahwa doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Hukum-hukum tersebut ditetapkan di dalam hukum perdata maupun perundang-undangan berkenaan dengan teori-teori serta konsep-konsep yang diwakili oleh doktrin itu. Dengan demikian, doktrin adalah pondasi bagi terbentuknya hukum perdata suatu negara. Contohnya dalam pembuatan kebijakan Penanaman Modal Asing yang menyesuaikan dengan doktrin ekonomi Islam yaitu berbasis pada keadilan sosial. Maka dalam pembuatan kebijakan tersebut dapat dirumuskan apakah akan menunjang pengusaha-pengusaha lokal dan membatasi usaha asing atau sebaliknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustiati, Agustiati 2009. "Sistem Ekonomi Kapitalisme." *Academican* 1 (2): 152–166. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2326>.
- Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Islam Kontemporer*. Depok: Kencana.
- Aziz, Talib M. 2013. "An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (Late) Muhammad Baqir al-Sadr." 12 Maret 2013. <https://www.al-islam.org/al-tawhid/vol10-n1/islamic-perspective-political-economy-views-m-b-al-sadr-aziz/islamic-perspective>.
- Azka, Darul dan Nailul Huda. 2012. *Sulam Al-Munawraq: Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Bakar, M. Yunus Abu. 2012. "Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia." *Tsaqafah* 8 (1): 135-160. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.22>
- Birch, Kean dan Simon Springer. 2019. "Peak Neoliberalism? Revisiting and Rethinking The Concept of Neoliberalism." *Ephemera* 19 (3): 467–485. <http://www.ephemerajournal.org/contribution/peak-neoliberalism-revisiting-and-rethinking-concept-neoliberalism>.
- Brewer, Bradley R. 2014. "High and Classical Liberalism: Economic Liberties 'Thin' and 'Thick.'" Tesis, Ohio: Ohio University. https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=ohiou1408635090.
- Bryant, Christopher G.A. 1845. *Positivism in Social Theory and Research*. London: Macmillan Publisher.
- Dallas, Mark, dan Farangis Farangis. 2016. "Varieties of Capitalism: Critique of Neoliberal Capitalism." <https://www.coursehero.com/file/74072740/Critique-of-Neoliberalismdocx/>.
- Deliarnov. 1997. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elzbieta, Mączynska, dan Pysz Piotr. 2015. "Classical Liberalism, Neoliberalism, and Ordoliberalism." *OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy (Lithuania)* 1 (2): 17–40.

- Feirson, Jake. 2013. "The Reign of Large Multinational Corporations: The Culture of Capitalism." https://www.academia.edu/9639895/The_Culture_of_Capitalism.
- Hamzah, Supian Suri Ali. 2017. "Evaluasi Epistemologi Ekonomi Barat dan Islam dalam Tinjauan Iqtishâd." *At-Ta'fikir* 10 (1): 16-37. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/230>.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. 2007. "Neoliberalism as Creative Destruction." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 610: 22-44. <http://www.jstor.org/stable/25097888>.
- Held, David et al. 1999. *Global Transformations Politics, Economics and Culture*. California: Stanford University Press.
- Heryanto, Ariel. 1997. "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci." *Forum Keadilan* 6 (2).
- Heywood, Andrew. 2017. *Political Ideologies An Introduction*. London: Palgrave.
- Hiarief, Eric. 2004. "Gerakan Anti Kapitalisme Global." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8 (2): 139-160. <https://doi.org/10.22146/jsp.11050>.
- Howard, Michael C dan John E. King. 2008. *The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies: A Materialist Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 2019. "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia External Debt Statistics of Indonesia-Juni 2019," 2019. <https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/Documents/SULNI-Juni-2019.pdf>.
- Losurdo, Dominico. 2011. *Liberalism : A Counter History*. London: Verso.
- Pereira, Luiz Carlos Bresser. 2009. "Assault on the State and on the Market: Neoliberalism and Economic Theory." *Estudos Avançados* 23 (66): 7-23. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142009000200002>
- Munir, Rizal Mustansyir dan Misnal. 2007. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun. 1973. *Falsafah Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Platz, Jeppe von dan John Tomasi. 2015. *Liberalism and Economic Liberty*. Virginia: University of Richmond.
- Qomar. Moh Nurul. 2016. "Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr." *Iqtishoduna* 7 (1): 1-14. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/80>.
- Reiff, Mark R. 2016. "Two Theories of Economic Liberalism." *Adam Smith Review* 10 (2017): 189-214. https://www.academia.edu/12004339/Two_Theories_of_Economic_Liberalism.
- Şadr, Muhammad Bāqir al-. 1994. *Iqtisādunā Our Economics*. 1-2 ed. Vol. 1. Tehran: Wofis.
- . 2000. *Our Philosophy*. Diterjemahkan oleh Shams C Inati. Qom: Ansariyan Publication.
- Sambas, Syukriadi. 2017. *Mantik: Kaidah Berpikir Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soetrisno P. H. 1992. *Welfare State dan Welfare Society*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Sutopo, Oki Rahadianto. 2012. "Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1 (1): 30-43. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23423>.
- Takariawan, Cahyadi, dkk. 2003. *Dialog Peradaban Islam Menggugat Materialisme Barat*. Solo: Era Intermedia.
- Wisnu, Inggrida. 2016. "Ekonomi Pembangunan Konsep Mubyarto." https://www.academia.edu/24765984/Ekonomi_Pembangunan_Konsep_Mubyarto.